

## PERAN REGULASI TERKINI DALAM MENGATASI TANTANGAN HUKUM PERBANKAN DI ERA DIGITAL

Venia Utami Keliat <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[veniakeliat17@gmail.com](mailto:veniakeliat17@gmail.com) <sup>1)</sup>

### Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap industri perbankan, memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum yang dihadapi oleh perbankan di era digital. Artikel ini akan mempelajari tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan dalam mengelola keamanan data, perlindungan konsumen, dan integritas transaksi keuangan dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Tantangan ini meliputi risiko keamanan siber, pelanggaran privasi, penipuan elektronik, dan kompleksitas regulasi yang beragam di berbagai yurisdiksi. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan perbankan, laporan riset, studi kasus, dan panduan praktik terbaik yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Data ini akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam regulasi yang ada, serta mengusulkan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil. Hasil dari artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan regulasi perbankan yang lebih baik di era digital. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan kepada praktisi perbankan, otoritas pengawas, dan peneliti hukum untuk memahami tantangan hukum yang dihadapi oleh industri perbankan dan merancang solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini.

**Kata Kunci:** Regulasi, Perbankan, Hukum, Era Digital

### Abstract

*The rapid development of digital technology has changed the landscape of the banking industry, providing significant benefits, but also creating complex legal challenges. This article aims to analyze the role of current regulations in overcoming the legal challenges faced by banks in the digital era. This article will examine the main challenges faced by banks in managing data security, consumer protection, and the integrity of financial transactions in an ever-evolving digital environment. These challenges include cybersecurity risks, privacy breaches, e-fraud, and regulatory complexities that vary across jurisdictions. The methodology used in this article is descriptive and qualitative analysis, which involves collecting data from various sources, such as banking regulations, research reports, case studies, and best practice guides published by relevant authorities. This data will be analyzed comprehensively to identify weaknesses and deficiencies in existing regulations, as well as to propose corrective steps that can be taken. The results of this article are expected to contribute to developing better banking regulations in the digital era. In addition, this article also provides insight to banking practitioners, supervisory*

#### History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 Februari 2024

Published: 1 Maret 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



*authorities, and legal researchers to understand the legal challenges faced by the banking industry and design effective solutions to overcome these problems..*

*Keywords: Regulation, Banking, Law, Digital Age*

## **PENDAHULUAN**

Industri perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara (Arafah, 2019). Perbankan berperan sebagai perantara keuangan yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk pemberian pinjaman, penawaran rekening giro, tabungan, investasi, dan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, industri perbankan menghadapi berbagai tantangan baru dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam cara manusia berinteraksi dan bertransaksi secara finansial. Layanan perbankan digital, seperti internet banking, mobile banking, dan transaksi elektronik, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberadaan teknologi ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah perbankan, memungkinkan mereka untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja (Fariana & Safii, 2018). Namun, di balik manfaat yang ditawarkan oleh perbankan digital, terdapat tantangan dan risiko hukum yang perlu diatasi. Keamanan data dan privasi nasabah menjadi perhatian utama, mengingat adanya ancaman *cybercrime* dan pelanggaran keamanan informasi. Selain itu, penipuan elektronik, pencucian uang, dan praktik perbankan yang tidak etis juga merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Dalam konteks ini, regulasi perbankan memainkan peran yang sangat penting. Regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga integritas sistem keuangan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam industri perbankan. Regulasi perbankan mengatur berbagai aspek, seperti kepatuhan terhadap standar keuangan, transparansi pelaporan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan kebijakan anti-pencucian uang.

Dalam era digital, regulasi perbankan perlu mengikuti perkembangan teknologi dan mengantisipasi tantangan yang muncul (Ardianto et al., 2024). Pengaturan yang efektif dan adaptif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sektor perbankan, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. Dalam era digital yang semakin berkembang, industri perbankan menghadapi berbagai tantangan hukum yang unik dan kompleks. Regulasi perbankan yang efektif dan adaptif menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan, transparansi, dan kepercayaan dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum perbankan di era digital.

Masalah yang akan diteliti yaitu apa saja tantangan hukum yang dihadapi oleh industri perbankan di era digital, bagaimana regulasi terkini telah beradaptasi untuk mengatasi tantangan tersebut dan bagaimana dampak perubahan regulasi terhadap aktivitas perbankan di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis literatur, studi dokumen hukum, dan tinjauan regulasi perbankan terkini. Data dan informasi yang relevan akan dikumpulkan dari sumber-sumber yang diverifikasi, seperti jurnal ilmiah, laporan riset, peraturan perundang-undangan, dan publikasi terkait hukum perbankan. Analisis komprehensif akan dilakukan untuk menggambarkan peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum perbankan di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tantangan Hukum**

Tantangan hukum yang dihadapi oleh industri perbankan di era digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan bisnis dan kepercayaan nasabah. Untuk mengatasi tantangan ini, regulasi perbankan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam industri perbankan. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data dan privasi nasabah. Dalam era digital yang semakin terhubung, risiko keamanan siber meningkat. Pelanggaran data dan serangan hacking dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi nasabah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, regulasi perbankan perlu memastikan bahwa lembaga keuangan menjalankan langkah-langkah keamanan yang memadai, termasuk enkripsi data, otentikasi yang kuat, dan perlindungan terhadap serangan siber.

Penipuan elektronik juga menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh industri perbankan. Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi penjahat siber untuk melakukan penipuan, seperti phishing dan skimming. Regulasi perbankan harus mengatur tindakan pencegahan, pendidikan kepada nasabah, serta memperkuat kerjasama antarlembaga untuk melawan penipuan elektronik ini. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang juga menjadi tantangan penting. Perbankan digital memungkinkan transaksi yang cepat dan global, sehingga membutuhkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang. Regulasi perbankan perlu memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana lembaga keuangan harus mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, serta menjalin kerja sama dengan otoritas terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan pencucian uang.

Perlindungan konsumen juga merupakan aspek penting yang harus diatasi. Praktik perbankan yang tidak etis, biaya tersembunyi, atau ketidakjelasan dalam ketentuan kontrak dapat merugikan nasabah. Regulasi perbankan perlu memperkuat perlindungan konsumen, menetapkan standar etika yang tinggi dalam pelayanan perbankan, serta menyediakan mekanisme yang efektif untuk penyelesaian sengketa. Perkembangan industri fintech juga menciptakan tantangan baru bagi regulasi perbankan. Fintech menyediakan layanan keuangan alternatif yang dapat mengganggu model bisnis tradisional perbankan. Regulasi perbankan perlu mampu mengakomodasi perkembangan ini dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, inovasi, dan stabilitas sistem keuangan. Kerjasama antara regulator dan pelaku industri perbankan perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya regulasi yang sesuai dengan perkembangan fintech (Tambunan & Anwar, 2019).

Keberagaman regulasi di berbagai yurisdiksi juga menjadi tantangan tersendiri. Industri perbankan digital beroperasi secara lintas batas, sehingga perlu mematuhi regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Keberagaman regulasi ini dapat mempersulit implementasi layanan perbankan digital yang efisien dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, regulasi perbankan perlu mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan kerja sama antarlembaga dan harmonisasi regulasi di tingkat internasional. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, regulasi perbankan harus memiliki karakteristik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Regulasi perbankan yang efektif harus mampu melindungi kepentingan nasabah, memastikan keamanan dan kestabilan sistem keuangan, serta merangsang inovasi dalam industri perbankan.

## **B. Regulasi Terkini Untuk Menghadapi Tantangan**

Regulasi terkini dalam industri perbankan telah beradaptasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di era digital. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan data, penipuan elektronik, kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang, perlindungan konsumen, hingga perkembangan fintech. Berikut adalah deskripsi dan analisis mengenai bagaimana regulasi terkini telah beradaptasi untuk mengatasi tantangan tersebut:

1. **Keamanan Data dan Privasi Nasabah:** Regulasi terkini telah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keamanan data dan privasi nasabah. Undang-undang dan peraturan baru telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan melindungi data nasabah dengan cara yang efektif. Misalnya, undang-undang perlindungan data pribadi atau peraturan tentang keamanan siber mengatur standar keamanan yang harus dipatuhi oleh perusahaan perbankan. Regulasi ini mewajibkan penggunaan enkripsi yang kuat, pengelolaan akses data yang ketat, dan pelaporan kejadian pelanggaran data. Selain itu, regulasi juga mendorong perusahaan perbankan untuk meningkatkan kesadaran

nasabah tentang praktik keamanan digital. Kampanye edukasi dan panduan penggunaan layanan perbankan yang aman menjadi bagian dari regulasi ini. Dengan demikian, regulasi terkini telah beradaptasi dengan mengintegrasikan keamanan data dan privasi nasabah sebagai bagian penting dalam operasional perbankan.

2. **Penipuan Elektronik:** Regulasi terkini juga telah berusaha mengatasi penipuan elektronik dengan memberikan pedoman dan persyaratan yang lebih ketat bagi lembaga keuangan. Regulasi ini mendorong penggunaan metode keamanan yang lebih kuat, seperti otentikasi ganda, serta memperkuat perlindungan konsumen terhadap penipuan elektronik. Selain itu, regulasi juga mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan kasus penipuan elektronik dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penindakan hukum terhadap pelaku penipuan (Fais, 2021). Regulasi terkini juga telah mendorong pengembangan teknologi dan solusi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam mendeteksi pola penipuan elektronik. Dengan adanya regulasi yang adaptif, lembaga keuangan dapat memanfaatkan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan dengan lebih efektif (Njatrijani, 2019)
3. **Kepatuhan Terhadap Aturan Anti-Pencucian Uang:** Regulasi terkini juga berfokus pada kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang (AML) di era digital. Peraturan terbaru menuntut lembaga keuangan untuk meningkatkan sistem pemantauan transaksi dan pelaporan kegiatan yang mencurigakan. Regulasi ini mendorong penerapan teknologi analitik dan kecerdasan buatan dalam memeriksa dan menganalisis transaksi yang berpotensi mencurigakan. Selain itu, regulasi terkini juga memperkuat kerjasama antar lembaga dan lintas batas dalam melawan pencucian uang. Pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, dan penegak hukum menjadi bagian penting dari regulasi ini. Dengan demikian, regulasi terkini beradaptasi dengan menekankan pada kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan lintas negara untuk mengatasi tantangan pencucian uang di era digital. (Abubakar & Handayani, 2022)
4. **Perlindungan Konsumen:** Regulasi terkini telah meningkatkan perlindungan konsumen dalam layanan perbankan digital. Persyaratan yang lebih ketat diterapkan untuk mengatur transparansi informasi dan ketentuan kontrak, serta menetapkan standar etika yang tinggi bagi lembaga keuangan. Regulasi ini mewajibkan lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada nasabah mengenai biaya, risiko, dan hak-hak mereka. Selain itu, regulasi terkini juga memberikan peran yang lebih besar kepada otoritas pengawas dalam menangani keluhan nasabah dan menyelesaikan sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan aksesibilitas yang lebih baik bagi nasabah menjadi bagian dari regulasi ini. Dengan demikian, regulasi terkini beradaptasi dengan memperkuat perlindungan konsumen dan

memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif (Adrian, 2023).

5. Fintech: Regulasi terkini juga telah mengakomodasi perkembangan industri fintech. Dalam beberapa kasus, regulasi yang baru diperkenalkan untuk memastikan perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap aturan keuangan, dan stabilitas sistem keuangan. Namun, regulasi juga memberikan ruang bagi inovasi dan perkembangan fintech dengan mendorong kerja sama antara lembaga keuangan tradisional dan pelaku fintech. Regulasi terkini berusaha untuk menemukan keseimbangan antara memfasilitasi pertumbuhan fintech dan melindungi nasabah serta stabilitas sistem keuangan. Pendekatan yang adaptif ini mencerminkan perubahan paradigma dalam regulasi perbankan yang lebih inklusif dan berorientasi pada inovasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan aturan yang menjadi payung hukum bagi perbankan digital. Era bank digital merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 dan 5.0, aturan yang baru saja diterbitkan OJK tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Selanjutnya guna melengkapi ketentuan bank digital, OJK berturut-turut juga menerbitkan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum serta POJK Nomor 14/POJK.03/2021 sebagai Perubahan POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 23 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 menguraikan bank digital sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik yang dalam menyelenggarakan operasionalnya berbentuk badan hukum Indonesia (baru) maupun hasil transformasi bank badan hukum Indonesia menjadi bank digital. Definisi ini menunjukkan bahwa secara umum fungsi perbankan tidak berbeda daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Tantangan hukum bagi penyelenggaraan bank digital nampak jelas terlihat dalam pengaturan Pasal 24 POJK Nomor 12/POJK.03/2021. Dalam rumusan Pasal 24 peraturan itu menyebutkan, setidaknya terdapat enam tantangan hukum dan regulasi bagi penyelenggaraan bank digital.

### **C. Dampak Perubahan Regulasi**

Perubahan regulasi dalam industri perbankan di era digital memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas perbankan. Regulasi yang berkaitan dengan keamanan data, perlindungan konsumen, penipuan elektronik, kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang, serta perkembangan fintech telah mengubah cara lembaga keuangan beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah. Berikut adalah deskripsi dan analisis mengenai dampak perubahan regulasi terhadap aktivitas perbankan di era digital:

1. Keamanan Data dan Privasi Nasabah: Perubahan regulasi terkait keamanan data dan privasi nasabah telah mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan

langkah-langkah keamanan mereka. Ini termasuk menerapkan enkripsi data yang lebih kuat, sistem otentikasi yang lebih canggih, serta perlindungan terhadap serangan siber. Dampaknya adalah adanya perlindungan yang lebih baik bagi data dan informasi nasabah. Namun, dampak ini juga mengharuskan lembaga keuangan untuk mengeluarkan investasi yang lebih besar dalam teknologi dan infrastruktur keamanan. Mereka perlu memastikan bahwa sistem keamanan mereka terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan ancaman siber yang terus berubah. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi keamanan data juga membutuhkan perubahan dalam kebijakan dan prosedur internal perbankan.

2. **Perlindungan Konsumen:** Perubahan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan konsumen telah mengubah cara lembaga keuangan berinteraksi dengan nasabah. Regulasi ini memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada nasabah lebih transparan dan jelas, termasuk mengenai biaya, risiko, dan hak-hak mereka. Dampaknya adalah adanya peningkatan kesadaran nasabah tentang hak-hak mereka dan penggunaan layanan perbankan yang lebih aman. Lembaga keuangan juga perlu melakukan penyesuaian dalam proses internal mereka, termasuk penyediaan informasi yang mudah diakses oleh nasabah dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dampaknya adalah adanya perubahan dalam budaya perbankan, dengan penekanan yang lebih besar pada kepuasan dan kepercayaan nasabah.
3. **Penipuan Elektronik:** Perubahan regulasi terkait penipuan elektronik telah mendorong lembaga keuangan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat. Regulasi ini mewajibkan penggunaan metode keamanan yang lebih canggih, seperti otentikasi ganda, serta melibatkan lembaga keuangan dalam pelaporan dan penindakan penipuan elektronik. Dampaknya adalah adanya penurunan risiko penipuan bagi nasabah. Namun, perubahan regulasi ini juga memerlukan investasi yang lebih besar dalam sistem keamanan dan teknologi yang lebih maju. Lembaga keuangan perlu melatih karyawan mereka dan meningkatkan kesadaran tentang penipuan elektronik serta memperbarui kebijakan dan prosedur untuk mengakomodasi perubahan ini (Muchlis, 2018).
4. **Kepatuhan Terhadap Aturan Anti-Pencucian Uang:** Perubahan regulasi terkait kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang (AML) mempengaruhi aktivitas perbankan di era digital. Lembaga keuangan harus meningkatkan sistem pemantauan transaksi dan pelaporan kegiatan yang mencurigakan. Dampaknya adalah adanya peningkatan kualitas pelaporan kegiatan transaksi yang mencurigakan dan peningkatan efektivitas pencegahan pencucian uang. Meningkatnya persyaratan kepatuhan juga membutuhkan sumber daya yang lebih besar dari lembaga keuangan. Mereka perlu menginvestasikan waktu dan tenaga untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi AML yang ketat. Dampaknya adalah adanya perubahan dalam proses dan sistem internal

perbankan untuk memenuhi tuntutan regulasi ini.

5. Perkembangan Fintech: Perubahan regulasi juga berdampak pada perkembangan fintech dalam industri perbankan. Regulasi terkini memberikan ruang bagi inovasi dan perkembangan fintech, dengan mendorong kerja sama antara lembaga keuangan tradisional dan pelaku fintech. Dampaknya adalah adanya peningkatan jumlah dan variasi layanan perbankan digital yang ditawarkan kepada nasabah. Namun, regulasi juga perlu memastikan bahwa perkembangan fintech tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang aman dan terpercaya. Dampaknya adalah adanya peningkatan persyaratan kepatuhan dan pengawasan terhadap pelaku fintech, sehingga mempengaruhi model bisnis dan operasional mereka. Perubahan regulasi dalam industri perbankan di era digital memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas perbankan. Regulasi ini melibatkan perlindungan data dan privasi nasabah, perlindungan konsumen, pencegahan penipuan, kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang, serta perkembangan fintech. Dampaknya mencakup perubahan dalam sistem keamanan, prosedur internal, kebijakan, budaya perbankan, serta mempengaruhi investasi, waktu, dan sumber daya yang diperlukan oleh lembaga keuangan.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum perbankan di era digital adalah sebagai berikut:

1. Perlunya regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi: Era digital membawa perubahan besar dalam industri perbankan, termasuk adanya transaksi online, keamanan data, dan perkembangan fintech. Regulasi yang terkini harus dapat menanggapi tantangan-tantangan ini dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti perlindungan data, keamanan siber, dan pengawasan terhadap inovasi fintech.
2. Meningkatkan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen: Regulasi terkini harus fokus pada perlindungan konsumen dan keamanan transaksi di era digital. Hal ini termasuk mengatur persyaratan keamanan teknologi perbankan, perlindungan data pribadi, dan penanganan penipuan serta kejahatan siber. Regulasi yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap perbankan digital dan memberikan jaminan bahwa konsumen dilindungi dengan baik.
3. Menyediakan kerangka kerja untuk inovasi fintech yang berkelanjutan: Era digital juga menandai perkembangan pesat inovasi fintech, seperti platform pembayaran digital dan layanan keuangan berbasis teknologi. Regulasi yang terkini harus menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan inovasi fintech berkembang secara berkelanjutan, sambil memastikan bahwa risiko dan kepentingan konsumen dilindungi. Regulasi yang fleksibel dan responsif dapat mendorong



- pertumbuhan fintech yang sehat tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.
4. Penegakan hukum yang efektif: Regulasi tanpa penegakan hukum yang efektif memiliki sedikit manfaat. Oleh karena itu, kesimpulan terakhir adalah pentingnya penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran regulasi perbankan di era digital. Penegakan hukum yang tegas dan efisien dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan keuangan, serta memastikan bahwa regulasi terkini benar-benar diterapkan dan diikuti dengan baik.

Dalam kesimpulannya, peran regulasi terkini sangat penting dalam mengatasi tantangan hukum perbankan di era digital. Regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi, perlindungan konsumen, inovasi fintech, dan penegakan hukum yang efektif akan membantu membangun ekosistem perbankan digital yang aman, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259-270.
- Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88.
- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70-90.
- Fariana, A., & Safii, A. (2018). Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum. *Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 17(2), 417-430.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335-357.
- Tambunan, M. R., & Anwar, R. (2019). Transformasi budaya organisasi otoritas perpajakan indonesia menghadapi era ekonomi digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 5(2), 253-253
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).